

CONVERGENCE: JOURNAL OF GLOBAL DYNAMICS

Program Studi Hubungan Internasional, UIN Alauddin Makassar

ISSN: 3109 –4228 (Print) | e-ISSN: 3109 –4198 (Online)

ANALISIS KRISIS DEMOKRASI DI ISRAEL: STUDI KASUS REFORMASI YUDISIAL ISRAEL OLEH BENJAMIN NETANYAHU PADA TAHUN 2023

Namira Syarafina Alayda Amir

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Email: Namiramirs20@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the democratic crisis in Israel in 2023 through the case study of the judicial reform proposed by Prime Minister Benjamin Netanyahu. The research highlights how the reform became an instrument to strengthen executive power while weakening the Supreme Court, and how Netanyahu's personal factors, including his corruption cases, influenced Israel's domestic and foreign policies, particularly towards Palestine. This research employs a qualitative method with a library research approach. The theory of Competitive Authoritarianism is used to explain Netanyahu's consolidation of power within a formal democratic framework, while Operational Code theory is applied to trace Netanyahu's philosophical and instrumental beliefs that emphasize military power over diplomacy. The findings reveal that the judicial reform represents Netanyahu's authoritarian character as a strong man who seeks to undermine the judiciary for political and personal interests. This democratic crisis has led to polarization within Israeli society, intensified domestic conflicts, and increasingly aggressive foreign policies toward Palestine, especially after the October 7, 2023 attacks. Furthermore, the reform triggered international criticism and worsened Israel's reputation as a democratic state in the eyes of the global community.

Keywords: Judicial Reform Israel; Democratic Crisis; Benjamin Netanyahu; Competitive Authoritarianism; Operational Code.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis demokrasi di Israel pada tahun 2023 melalui studi kasus reformasi yudisial yang diajukan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penelitian ini menyoroti bagaimana reformasi tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat kekuasaan eksekutif sekaligus melemahkan Mahkamah Agung, serta bagaimana faktor personal Netanyahu, termasuk kasus korupsinya, berpengaruh terhadap arah kebijakan domestik dan luar negeri Israel, khususnya terhadap Palestina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Teori Otoritarianisme Kompetitif digunakan untuk menjelaskan praktik konsolidasi kekuasaan Netanyahu dalam kerangka demokrasi formal, sementara teori Operational Code digunakan untuk menelusuri keyakinan filosofis dan instrumental Netanyahu yang cenderung mengutamakan kekuatan militer daripada diplomasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi yudisial merupakan manifestasi dari watak otoritarian Netanyahu sebagai figur strong man yang berupaya menundukkan lembaga yudisial demi kepentingan politik dan personalnya. Krisis demokrasi ini berdampak pada polarisasi masyarakat Israel, menguatnya konflik domestik, serta kebijakan luar negeri yang semakin agresif terhadap Palestina, terutama pasca serangan 7 Oktober 2023. Selain itu, reformasi ini juga menimbulkan kritik internasional dan memperburuk citra Israel sebagai negara demokrasi di mata dunia.

Kata Kunci: Reformasi Yudisial; Israel; Krisis Demokrasi; Benjamin Netanyahu; Otoritarianisme Kompetitif; Kode Operasional.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara di berbagai belahan dunia ialah Demokrasi. Sistem ini merupakan bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang melindungi kepentingan rakyat secara efektif, memberikan kebebasan serta peluang yang sama bagi seluruh warga negara, dan yang terpenting, menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak minoritas (Infotmatif, n.d.). Salah satu aspek utama yang menjamin keberlangsungan sistem demokrasi adalah pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan mekanisme checks and balances, yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sistem demokrasi tidak terlepas dari berbagai tantangan, yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan melemahkan lembaga-lembaga demokratis. Krisis demokrasi dapat terjadi ketika prinsip-prinsip

seperti perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan supremasi hukum terancam atau diabaikan, yang berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan, erosi hak-hak sipil, dan meningkatnya polarisasi politik.

Salah satu kasus yang telah menjadi diskusi beberapa waktu belakangan ini di kanca internasional sebagai krisis demokrasi di era modern adalah Israel. Israel mengadopsi sistem demokrasi parlementer di tengah kawasan Timur Tengah yang didominasi oleh pemerintahan otoriter. Walaupun Israel belum memiliki konstitusi formal, kerangka hukum diatur melalui rangkaian Basic Laws yang bersifat semi-konstitusional. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung (MA) Israel memiliki posisi strategis karena bertugas mengawasi kinerja legislatif dan eksekutif, serta menjadi penjaga terhadap pelanggaran hak-hak warga negara, termasuk kelompok minoritas.

Krisis demokrasi di Israel pada tahun 2023 dimulai ketika Pemerintah Israel pada 4 Januari 2023, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang kembali berkuasa pasca kemenangan pemilu 2022 melalui menteri kehakimannya, Yariv Levin, mengajukan serangkaian reformasi yudisial yang kontroversial (Elisa Baker, n.d.). Reformasi ini berupaya untuk membatasi kekuasaan Mahkamah Agung dan meningkatkan kontrol eksekutif untuk menunjuk hakim. Langkah ini dianggap sebagai upaya konsolidasi kekuasaan yang mengarah pada otoritarianisme, mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan independensi yudisial. Reformasi tersebut memicu gelombang protes besar di seluruh Israel, dengan ratusan ribu warga turun ke jalan menentang perubahan yang dianggap melemahkan sistem checks and balances. Walaupun sempat terhenti, sidang untuk reformasi dilanjutkan, dan pada tanggal 24 Juli 2023, Knesset Israel mengesahkan RUU yang mencabut kewenangan Mahkamah Agung Israel untuk menyatakan keputusan pemerintah, disahkan dengan suara 64 berbanding 0. Di sisi lain, para pendukung reformasi dari kubu Netanyahu berpendapat bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan. Mereka berargumen bahwa peradilan selama ini terlalu banyak campur tangan dalam urusan politik dan telah mengambil peran yang terlalu dominan dalam menafsirkan undang-undang (Ehl, 2023).

Dalam konteks hubungan internasional, krisis demokrasi ini dapat berdampak pada kebijakan Israel terhadap Palestina, khususnya terkait permukiman di Tepi Barat. Pemerintah Netanyahu mempercepat pembangunan permukiman baru, sebuah tindakan yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, seperti pengumuman rencana pembangunan 5.700 unit rumah pada 26 Juni 2023 (Peace, 2023). Kebijakan ekspansionis ini memperburuk hubungan Israel dengan Palestina dan menimbulkan ketegangan dengan sekutu tradisionalnya. Secara keseluruhan, krisis

demokrasi di Israel pada tahun 2023 menunjukkan bagaimana perubahan internal dalam struktur pemerintahan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasional, khususnya melalui percepatan pembangunan permukiman di Tepi Barat, dan peningkatan penggunaan angkatan militer Israel di wilayah yang semakin menjauhkan prospek perdamaian.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka konseptual sekaligus menempatkan penelitian pada diskursus akademik yang lebih luas. Beberapa konsep utama yang digunakan adalah teori otoritarianisme kompetitif, teori operational code. Selain itu, penelitian ini juga berbeda dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Yang pertama yakni Otoritarianisme Kompetitif Teori otoritarianisme kompetitif yang dikembangkan oleh Steven Levitsky dan Lucan Way (2010) menjelaskan karakteristik rezim hibrida di mana institusi demokratis seperti pemilu, parlemen, dan lembaga peradilan tetap dipertahankan secara formal, tetapi substansi demokrasi dilemahkan melalui praktik manipulatif yang dilakukan oleh aktor politik dominan. Dalam rezim seperti ini, pemilu memang berlangsung secara reguler, namun persaingan tidak setara karena pemerintah memanfaatkan sumber daya negara, mengendalikan media, atau melemahkan independensi lembaga hukum.(Way, 2011)

Dalam konteks Israel, reformasi yudisial tahun 2023 dapat dipahami sebagai strategi Netanyahu untuk melemahkan Mahkamah Agung yang selama ini berperan sebagai benteng terakhir demokrasi. Mahkamah Agung dikenal sering membatasi kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar prinsip demokrasi, sehingga upaya membatasi kewenangannya berarti mengurangi fungsi pengawasan yang vital (Thorner, 2023). Dengan demikian, Netanyahu mempertahankan façade demokrasi berupa pemilu multipartai dan parlemen yang tetap berjalan, tetapi secara substansi justru mengikis pilar demokrasi (Way, 2011).

Yang kedua, Teori operational code pertama kali diperkenalkan oleh Alexander George (1969), kemudian dikembangkan oleh Holsti (1976) dan Walker. Teori ini menekankan bahwa setiap pemimpin memiliki seperangkat keyakinan filosofis dan instrumental yang memengaruhi pola pengambilan keputusan politik, terutama dalam kebijakan luar negeri. Keyakinan filosofis

berkaitan dengan pandangan pemimpin terhadap sifat dunia politik: apakah dipandang sebagai arena konflik atau kerja sama. Sementara keyakinan instrumental menyangkut strategi yang dipilih: apakah melalui diplomasi, kompromi, atau penggunaan kekuatan militer (Holsti, 2013)

Dalam kasus Netanyahu, keyakinan filosofisnya cenderung melihat dunia sebagai arena penuh ancaman terhadap eksistensi Israel. Oleh karena itu, keamanan nasional ditempatkan sebagai prioritas utama. Sedangkan dalam ranah instrumental, Netanyahu lebih mengandalkan kekuatan militer dibandingkan diplomasi sebagai strategi utama menghadapi Palestina. Hal ini sejalan dengan pernyataan kebijakan dan keputusan militer yang diambil Netanyahu, khususnya setelah serangan 7 Oktober 2023 (United Nation Human Rights, 2024)

Oleh karena itu dalam konteks Israel, sejumlah penelitian telah menegaskan bahwa Netanyahu merupakan salah satu pemimpin paling berpengaruh sekaligus kontroversial dalam sejarah politik Israel modern. Gaya kepemimpinan Netanyahu yang memadukan narasi keamanan dengan strategi politik elektoral telah menimbulkan kekhawatiran akan semakin menurunnya kualitas demokrasi Israel. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung berfokus pada aspek domestik serta belum banyak dikaji dan menghubungkannya dengan kebijakan luar negeri.

Penelitian ini berbeda karena berusaha melihat keterkaitan antara krisis demokrasi domestik Israel dengan kebijakan luar negeri terhadap Palestina. Dengan menggunakan kombinasi teori otoritarianisme kompetitif, operational code, penelitian ini menempatkan krisis demokrasi bukan hanya sebagai persoalan internal, tetapi juga sebagai faktor yang berpengaruh langsung terhadap perilaku politik luar negeri Israel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena krisis demokrasi di Israel pada tahun 2023 yang dipicu oleh reformasi yudisial Benjamin Netanyahu serta implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna dari sebuah fenomena sosial melalui perspektif aktor maupun melalui kajian literatur yang tersedia dengan menekankan deskripsi naratif yang menyeluruh dan kontekstual (Dr. Hj. Ipa Hafsiyah Yakin, Dra., SE., M.Si., MM., n.d.).

Metode studi pustaka digunakan karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer seperti wawancara atau observasi lapangan, melainkan mengandalkan sumber data sekunder yang telah tersedia, sehingga analisis dilakukan secara kritis terhadap berbagai literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, maupun pemberitaan media massa yang kredibel.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yakni sumber primer sekunder dan sumber sekunder. Sumber primer sekunder mencakup dokumen resmi seperti teks reformasi yudisial yang diajukan pemerintah Israel, putusan Mahkamah Agung, pernyataan pejabat pemerintah, serta dokumen kebijakan luar negeri Israel, sementara sumber sekunder meliputi literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal, laporan lembaga internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan International Crisis Group, serta pemberitaan media internasional seperti The Guardian, BBC, Al Jazeera, maupun media lokal Israel seperti Haaretz dan The Times of Israel. Keberagaman sumber ini dimaksudkan untuk menghasilkan analisis triangulatif yang dapat memperkuat validitas penelitian, dengan mempertimbangkan kredibilitas dan relevansi sumber terhadap isu yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyaring informasi yang relevan dari literatur yang diperoleh, khususnya yang berkaitan dengan krisis demokrasi, reformasi yudisial, gaya kepemimpinan Netanyahu, serta kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina. Informasi yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi sistematis dan kronologi peristiwa untuk menunjukkan keterkaitan antara konsep, teori, dan fenomena empiris. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis data dengan kerangka teori yang digunakan, yaitu otoritarianisme kompetitif, teori operational code sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis dengan memberikan interpretasi akademik terhadap fenomena yang diteliti.

Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, tidak adanya data primer berupa wawancara langsung dengan aktor politik Israel membuat analisis bergantung sepenuhnya pada data sekunder. Kedua, penggunaan media internasional berpotensi menghadirkan bias politik tertentu. Akan tetapi, keterbatasan ini diantisipasi melalui pemilihan sumber yang kredibel serta

penerapan triangulasi. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam krisis demokrasi di Israel dan implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina, sekaligus menjaga validitas akademik melalui pendekatan kualitatif yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik dan Sosial Sebelum Reformasi Yudisial Israel Tahun 2022

Kembalinya Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri pada 2022 menandai perubahan signifikan dalam arah politik Israel. Pola kepemimpinannya yang semakin terpusat dan sarat agenda ideologis membuat konsolidasi kekuasaan tidak hanya tampak pada dominasi politik internal, tetapi juga melalui wacana perubahan struktural dalam institusi hukum negara. Reformasi yudisial yang muncul pada awal 2023 merupakan manifestasi langsung dari strategi tersebut. Untuk memahami situasi ini, perlu dilihat bagaimana kondisi sosial dan politik Israel berkembang sebelum reformasi digulirkan.

Israel tidak memiliki konstitusi tertulis, melainkan menjalankan sistem hukum berbasis Basic Laws dengan Mahkamah Agung sebagai pengawas utama. Sejak 1990-an, Mahkamah Agung melalui Aharon Barak memperkenalkan judicial review dengan prinsip kewajaran dan proporsionalitas, sehingga dapat membatalkan kebijakan eksekutif maupun legislatif yang dianggap merugikan kepentingan publik. Namun, doktrin ini justru menimbulkan perdebatan sengit, terutama dari kubu politik kanan yang menilai Mahkamah terlalu elitis dan liberal.

Ketidakstabilan politik semakin terlihat pada 2022 ketika Israel mengalami lima kali pemilu hanya dalam tiga tahun. Polarisasi antara blok kanan-religius dan blok sekuler-liberal menajam, mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kondisi ini membuka jalan bagi Netanyahu untuk kembali berkuasa pada November 2022 melalui koalisi partai sayap kanan Likud, Religious Zionism, dan kelompok ultra-Ortodoks, yang secara ideologis mendorong penguatan identitas Yahudi. Meski tengah menghadapi tiga kasus korupsi Kasus 1000, 2000, dan 4000 (Norman Eiesen, 2023). Netanyahu berhasil membentuk pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel dengan 64 kursi di Knesset.

Laporan Puslit DPR RI (2022) menegaskan polarisasi sosial ini semakin tajam. Kelompok religius mendukung agenda nasionalis, sementara kelompok sekuler mengkritik arah politik yang

dinilai menyimpang dari prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, reformasi yudisial yang didorong Netanyahu tidak hanya dilihat sebagai kebijakan hukum, melainkan juga sebagai strategi untuk melemahkan Mahkamah Agung yang kerap menghambat agenda politiknya serta berpotensi melindunginya dari kasus hukum yang menjeratnya (Rizki Roza, 2022).

B. Reformasi Yudisial dan Krisis Demokrasi Israel 2023

Pada 4 Januari 2023, Menteri Kehakiman Yariv Levin mengumumkan paket reformasi yudisial yang mencakup enam poin utama, antara lain pembatasan judicial review, pencabutan doktrin kewajaran, pelemahan posisi jaksa negara, serta dominasi eksekutif dalam seleksi hakim (Elisa Baker, n.d.). Reformasi ini dipandang banyak kalangan sebagai langkah otoriter yang melemahkan prinsip checks and balances.

Puncak ketegangan terjadi pada Juli 2023 ketika Knesset mengesahkan Amandemen No. 3 yang mencabut kewenangan Mahkamah Agung untuk meninjau kewajaran keputusan eksekutif. Dengan demikian, pemerintah memiliki keleluasaan mutlak dalam pengambilan keputusan tanpa dapat dikontrol lembaga peradilan. Reformasi ini dianggap berisiko merusak supremasi hukum dan mendorong Israel menuju demokrasi mayoritarian (Zaher, 2023).

Protes massal pecah di berbagai kota besar, melibatkan akademisi, buruh, pengusaha teknologi, hingga tentara cadangan IDF. Polarisasi semakin meluas ke ruang publik, keluarga, dunia pendidikan, bahkan militer. Survei Israel Democracy Institute (2023) menunjukkan 63% warga meyakini reformasi akan memperlemah demokrasi, sementara kepercayaan terhadap pemerintah dan Knesset justru menurun (Institute, 2024).

Analisis Freedom House 2023–2024, (House, 2024) mencatat kemunduran Israel dalam empat aspek demokrasi:

1. **Sistem pemilu** tetap kompetitif, namun tidak sepenuhnya berlangsung dalam kondisi yang setara dan adil
2. **Akuntabilitas politik** melemah akibat penghapusan doktrin kewajaran dan penyalahgunaan lembaga negara juga menjadi ciri menonjol dari pola kepemimpinan Netanyahu Dalam konteks teori Levitsky dan Way, kondisi ini mencerminkan adanya kooptasi institusi hukum demi memperkuat posisi petahana.
3. **Kebebasan sipil** tertekan dengan adanya pembatasan protes dan stigma terhadap oposisi, Pemecatan terhadap Menteri Pertahanan Yoav Gallant karena menyerukan kompromi,

tekanan terhadap aktivis, dan stigma yang dilekatkan terhadap pengunjuk rasa menunjukkan bahwa pemerintah semakin intoleran terhadap perbedaan pendapat.

4. **Kebebasan pers** terdapat dominasi narasi propemerintah, terutama dari media-media besar seperti Israel Hayom yang secara terang-terangan mendukung Netanyahu. Media yang kritis terhadap kebijakan pemerintah sering kali mengalami tekanan atau dideligitimasi secara politik.

Dengan demikian, reformasi ini bukan hanya manuver administratif, melainkan strategi konsolidasi kekuasaan Netanyahu. Melalui kerangka **Otoritarianisme Kompetitif**, terlihat bahwa pemilu tetap berjalan, tetapi dengan kondisi yang tidak adil; lembaga negara dimanipulasi; kebebasan sipil dibatasi; dan akses media timpang.

C. Putusan Mahkamah Agung dan Dinamika Politik 2024

Pada 1 Januari 2024, Mahkamah Agung membatalkan Amandemen No. 3 (Rabinovitch, 2024), memulihkan kembali kewenangannya dalam meninjau keputusan pemerintah. Putusan ini disambut gembira masyarakat sipil yang sejak 2023 menggelar protes rutin, namun dikecam keras oleh kubu Netanyahu. Meski perang pasca serangan Hamas 7 Oktober 2023 sempat mengalihkan fokus publik, perdebatan soal reformasi yudisial tetap membara.

Koalisi Netanyahu menyebut putusan Mahkamah “ekstrem dan memecah belah,” sementara oposisi menilai sebagai kemenangan bagi demokrasi. Dengan demikian, kondisi politik Israel tetap tegang, di mana pemerintah menahan laju reformasi untuk sementara, tetapi kelompok kanan menekan agar agenda tersebut dilanjutkan setelah perang (Al Jazeera, 2024).

D. Implikasi Reformasi Yudisial terhadap Palestina

Reformasi yudisial memberi dampak signifikan terhadap kebijakan luar negeri Israel, terutama terhadap Palestina. Dengan melemahkan Mahkamah Agung, kontrol terhadap kebijakan ekspansionis semakin berkurang. Pemerintah Netanyahu mempercepat pembangunan permukiman di Tepi Barat meningkat dua kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya (Magid, 2023). dan memperluas operasi militer di Gaza dan Jenin, yang menimbulkan ribuan korban jiwa sipil Palestina (Nirenstein, 2024).

Reformasi yudisial menciptakan kondisi struktural yang memfasilitasi implementasi kebijakan ekspansionis tersebut. Dengan melemahnya kontrol Mahkamah Agung, pemerintah memperoleh keleluasaan lebih besar untuk mengesahkan kebijakan permukiman yang sebelumnya

kerap dibatalkan atas dasar pelanggaran hukum internasional. Sebagai contoh, antara Januari hingga Juni 2023, persetujuan pembangunan permukiman di Tepi Barat meningkat secara signifikan, bertepatan dengan proses pengesahan reformasi (Magid, 2023). Hilangnya mekanisme judicial review terhadap keputusan eksekutif menghilangkan hambatan institusional terakhir yang dapat menunda atau membatalkan kebijakan ekspansionis. Dalam konteks ini, reformasi yudisial bukan hanya tentang perubahan prosedural, melainkan instrumen politik yang secara strategis membuka ruang bagi implementasi kebijakan luar negeri yang lebih agresif tanpa checks and balances yang efektif dari lembaga peradilan.

Melalui kacamata **Operational Code Theory (OCT)**, Netanyahu memandang lingkungan internasional sebagai arena permusuhan permanen, berakar pada doktrin *Iron Wall* Jabotinsky. Secara instrumental, strategi luar negerinya menekankan kekuatan koersif dibanding diplomasi, dengan tujuan memperkuat dominasi Yahudi atas seluruh wilayah Israel Raya.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa reformasi yudisial bukan sekadar urusan domestik, melainkan instrumen untuk memperkuat kontrol Netanyahu, baik di dalam negeri maupun terhadap Palestina. Respon internasional termasuk kritik Uni Eropa dan keberatan Presiden Joe Biden masih bersifat simbolis, sehingga kebijakan ekspansionis Israel terus berlanjut tanpa konsekuensi signifikan.

Secara keseluruhan, dinamika politik Israel sejak 2022 hingga 2024 memperlihatkan pola otoritarianisme kompetitif yang semakin menguat. Reformasi yudisial melemahkan lembaga demokrasi, memicu polarisasi sosial, serta memperkuat kebijakan luar negeri yang agresif terhadap Palestina. Dengan demikian, krisis demokrasi Israel tidak hanya persoalan internal, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas kawasan dan legitimasi hukum internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Reformasi Yudisial Israel tahun 2023 yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu merupakan titik kritis yang mendorong sistem politik Israel ke dalam krisis demokrasi legalistik. Berdasarkan analisis Teori Otoritarianisme Kompetitif, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi hukum, melainkan merupakan manuver strategis untuk menciptakan Ketimpangan Arena Institusional dengan secara sistematis melumpuhkan fungsi Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga checks and balances yang kuat dalam struktur konstitusional Israel yang unik dan tidak terkodifikasi.

Netanyahu sebagai figur strong man, menggunakan mayoritas legislatifnya untuk mengesahkan perubahan hukum yang bertujuan untuk memusatkan kekuasaan eksekutif. Motif di balik tindakan ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan personal dan politiknya, sebagaimana dianalisis melalui Teori Operational Code (OCT). OCT menunjukkan bahwa worldview Netanyahu memandangnya sebagai korban dari institusi hukum yang bermusuhan, sehingga reformasi yudisial adalah respons 'defensif' untuk mengamankan kekuasaan dan menghindari potensi konsekuensi hukum dari kasus-kasus korupsi yang sedang ia hadapi.

Dampak krisis demokrasi ini bersifat ganda. Secara domestik, ia memicu polarisasi ekstrem dan mobilisasi massa sipil yang masif, serta ketegangan serius dalam institusi kunci negara, termasuk militer (IDF), yang menunjukkan adanya keretakan fundamental dalam kohesi sosial dan politik. Secara internasional, pelemahan institusi yudikatif secara langsung berdampak pada kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina. Reformasi ini memberikan landasan struktural bagi Kabinet yang didominasi sayap kanan untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih agresif, ekspansionis, dan tidak akuntabel, terutama dalam hal percepatan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat. Kehilangan pengawasan yudisial memperkuat dominasi militer dan menolak jalur kompromi diplomatik, konsisten dengan Operational Code Netanyahu yang mengedepankan kekuatan.

Oleh karena itu, reformasi yudisial ini tidak sekadar perselisihan politik, tetapi merupakan transisi struktural yang mengancam identitas Israel sebagai negara demokrasi liberal yang stabil. Meskipun pembatalan amandemen oleh Mahkamah Agung pada awal tahun 2024 memberikan kemenangan sementara bagi pendukung demokrasi, inti dari perpecahan dan ancaman otoritarianisme kompetitif yang didorong oleh seorang strong man seperti Benjamin Netanyahu tetap menjadi tantangan mendalam bagi masa depan politik Israel.

DAFTAR PUSTAKA

Al Jazeera. (2024). *Israel's Supreme Court strikes down judicial overhaul law*.

<https://www.aljazeera.com/news/2024/1/1/israels-supreme-court-strikes-down-judicial-overhaul-law#:~:text=Before Israel launched its latest,weekly protests against the government>

Dr. Hj. Ipa Hafsiyah Yakin, Dra., SE., M.Si., MM., P. . (n.d.). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *ResearchGate* (Vol. 5, Issue January).

- Ehl, D. (2023). *Israel Sahkan RUU Reformasi Pengadilan, Batasi Kekuasaan MA*.
<https://www.dw.com/id/israel-sahkan-ruu-reformasi-pengadilan-batasi-kekuasaan-ma/a-66334711>
- Elisa Baker. (n.d.). *Judicial Reform in Israel: A Case Study on Democracy*. Columbia Political Review. <https://www.cpreview.org/articles/2023/2/judicial-reform-in-israel-a-case-study-on-democracy>
- Holsti, O. (2013). Making american foreign policy. In *Making American Foreign Policy*.
<https://doi.org/10.4324/9780203625446>
- House, F. (2024). *Freedom In The World 2024*. https://freedomhouse.org/country/israel/freedom-world/2024?utm_
- Infotmatif. (n.d.). *pengertian demokrasi menurut abraham lincoln*.
<https://www.informatif.id/pengertian-demokrasi-menurut-abraham-lincoln>
- Institute, T. I. D. (2024). *The Israeli Democracy Index 2023*. <https://en.idi.org.il/articles/53380>
- Magid, Y. (2023). *Israel advances plans for 5,700 settlement homes, breaking annual record in 6 months*. <https://www.timesofisrael.com/israel-advances-plans-for-5700-settlement-homes-breaking-annual-record-in-6-months/>
- Nirenstein, F. (2024). *Netanyahu's leadership and the survival of Israel*.
<https://www.jns.org/netanyahus-leadership-and-the-survival-of-israel/>
- Norman Eiesen, M. P. and K. S. (2023). *The corruption and autocracy nexus: The case of "King Bibi."* https://www.brookings.edu/articles/the-corruption-and-autocracy-nexus-the-case-of-king-bibi/?utm_
- Peace, F. for middle east. (2023). *Settlement & Annexation Report: June 30, 2023*.
<https://fmep.org/resource/settlement-annexation-report-june-30-2023/>
- Rabinovitch, A. (2024). *Israel's Supreme Court strikes down disputed law that limited court oversight*. <https://www.reuters.com/world/middle-east/israels-supreme-court-strikes-down-disputed-law-that-limited-court-oversight-2024-01-01/#:~:text=JERUSALEM%2C Jan 1 %28Reuters%29 ,sparked months of nationwide protests>
- Rizki Roza. (2022). *Arah Pemerintahan Baru Israel*.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---II-PUSLIT-November-2022-244.pdf?utm

- Thorner, A. (2023). *Netanyahu's Antidemocratic Reforms*. <https://democratic-erosion.org/2023/12/05/netanyahus-antidemocratic-reforms/>
- United Nation Human Rights. (2024). *Update Report Six-month update report on the human rights situation in Gaza: 1 November 2023 to 30 April 2024*. <https://www.un.org/unispal/document/ohchr-press-release-report-08nov24/>
- Way, S. L. and L. A. (2011). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War by Steven Levitsky and Lucan A. Way. In *Political Science Quarterly* (Vol. 126, Issue 4, pp. 714–715). <https://doi.org/10.1002/j.1538-165x.2011.tb02211.x>
- Zaher, A. S. (2023). *Canceling Israel's "Reasonableness" Clause and its Implications on Palestinians*. <https://www.rosalux.ps/canceling-israels-reasonableness-clause-and-its-implications-on-palestinians-7704/>